

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI KHUSUS DAN BELANJA DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI JAWA TIMUR

Devita Rosmadayanti, Niniek Imaningsih, Riko Setya Wijaya

Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, Indonesia

Email: devitarosma234@gmail.com, niniekimaningsih@gmail.com,

rikosetyawijaya.80@gmail.com

INFO ARTIKEL

Diterima
25 Juli 2021
Direvisi
05 Agustus 2021
Disetujui
15 Agustus 2021

Kata Kunci: indeks pembangunan manusia; pertumbuhan ekonomi; pendapatan asli daerah; dana alokasi khusus; belanja daerah.

ABSTRAK

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari tiga indikator yang terdiri dari kesehatan, pendidikan dan standar hidup. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Jenis data yang didapatkan adalah data bersifat kuantitatif yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data *time series* mulai dari tahun 2009-2019 dengan menggunakan *software SPSS Statistic* versi 22.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan pengujian secara parsial, variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, serta variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

ABSTRACT

The Human Development Index is one way to measure the success of a country or region in the field of human development. The Human Development Index is a measure of community welfare that can be seen from three indicators consisting of health, education and living standards. The purpose of this study is to determine the effect of economic

How to cite:

Rosmadayanti, Devita., Imaningsih, N., & Wijaya, R. S. (2021) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Timur. *Jurnal Syntax Admiration* 2(8).
<https://doi.org/10.46799/jsa.v2i8.284>

E-ISSN:

2722-5356

Published by:

Ridwan Institute

Keywords: *human development index, economic growth, regional original income, special allocation funds, regional expenditures.* *growth, regional original income, special allocation funds, and regional expenditures on the human development index in East Java. The research method used is multiple linear regression analysis. The type of data obtained is quantitative data sourced from the Realization Report of the Regional Revenue and Expenditure Budget of East Java Province. In this study, the data used is time series data from 2009-2019 using SPSS Statistics software version 22.0. The results of this study indicate that simultaneously the independent variables consisting of Economic Growth, Regional Original Income, Special Allocation Funds and Regional Expenditures have a significant effect on the Human Development Index. While the partial test, the variables of Economic Growth and Regional Expenditures have an effect on the Human Development Index, and the variables of Regional Original Income and Special Allocation Funds have no effect on the Human Development Index.*

Pendahuluan

Prosedur pada pengembangan di suatu Negara diwajibkan untuk meluaskan Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkepanjangan. Akan tetapi, faktanya pembangunan nasional tidak bisa sukses jika dikelola oleh pemerintah pusat saja. Maka dari itu harus diadakannya pemerataan pembangunan Nasional, terutama didalam peningkatan pendanaan yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan untuk masyarakat agar bisa meningkatnya kualitas pembangunan manusia.

Provinsi Jawa Timur dinobatkan sebagai peringkat kedua di Indonesia dengan provinsi yang memiliki jumlah pendudukan terbesar. Jumlah penduduk Jawa Timur diperkirakan sebanyak 38,85 juta dan luas wilayah mencapai 47.800 km². Pembangunan manusia adalah ukuran pertumbuhan. Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 2019 terus membaik. Di tahun 2018 Indeks Pembangunan Jawa Timur berjumlah 70,77 selanjutnya di 2019 berjumlah 71,50 dan tumbuh 1,03%. Kota Surabaya memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) paling tinggi yaitu IPM nya mencapai 82,22 sementara IPM terendah di Jawa Timur berada di Sampang atas jumlah IPM sebesar 61,94. Terdapat 4 kabupaten/kota yang memiliki kategori IPM “sangat tinggi” antaranya Kota Malang, Kota Surabaya, Kota Madiun, dan Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan sejumlah 20 kabupaten/kota kategorinya “tinggi” dan 14 kabupaten/kota kategorinya “sedang” (Ogestiawan, 2012).

Pembangunan manusia itu penting sebab jika satu daerah bukan mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) yang terpendam bahwa langkah yang tepat yaitu menggunakan Sumber Daya Manusia (SDM). Melihat dari pernyataan tadi, maka peranan Sumber Daya Manusia itu sangatlah penting didalam proses pembangunan suatu daerah. Arah belakang dari pengembangan adalah kesejahteraan rakyat. Manusia tidak namun dijadikan sebagai bahan pembangunan saja tapi bisa dikatakan sebagai subjek, yang dimana manusia itu bisa ikut andil dalam kemajuan suatu wilayah yang

dimana jika diartikan secara makro manusia ini bisa berkontribusi besar dalam kemajuan negara (Prasetyo, 2008).

Jawa Timur Membentuk daerah Berpartisipasi di sistem otonomi lokal dengan pelaksanaan pemerintahan itu. Pemerintah daerah yang berperan sebagai bagian dari penyelenggara maka menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan “perlu memanipulasi serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan sesuai asas otonomi daerah semuanya diatur oleh pemerintah daerah”. Melalui inovasi, partisipasi masyarakat dan pelayanan masyarakat, maka daerah bisa mendukung misi dalam implementasi kesejahteraan.

Otonomi Daerah merupakan bagian dari desentralisasi, Jawa Timur dikenal memiliki kekayaan alam yang melimpah. Bahkan setiap kabupaten/kota juga memiliki kekayaan yang khas daerah masing-masing. Adanya potensi alam yang melimpah menjadikan peningkatan perekonomian suatu daerah secara signifikan.

Manfaat adanya otonomi daerah yaitu pemerintahan daerah bisa meningkatkan sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah sehingga bisa membiayai semua kebutuhan rumah tangganya mandiri. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai tujuan kedaulatan lingkungan yaitu “kesejahteraan masyarakat meningkat pada daerah yang dikuasai, meningkatkan kekuatan bersaing didaerah, dan salah satu bahan utama otonomi daerah secara tersusun yaitu memberi peningkatan pada indeks pengembangan manusia yang dimana pembangunan manusia ini digunakan sebagai peningkatan keselamatan untuk masyarakat”.

Menurut pendapat (Setyowati & Suparwati, 2012), menyebutkan bahwa saat ini seharusnya pembangunan sudah tidak lagi bertumpu pada kekuatan SDA (*based on natural resources*), tapi sebaiknya bertumpu pada kekuatan SDM (*based on human resources*). Hal yang diutamakan yaitu pembangunan manusia, sebab berhasilnya pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat itu tergantung dari kualitas pembangunan manusia.

Dari perspektif sektor ekonomi, manusia merupakan faktor pendukung keberhasilan pembangunan manusia itu sendiri. Bagi (Widodo, 2011) secara konsep pembangunan manusia merupakan sesuatu upaya yang dicoba buat menggapai hidup layak, secara universal bisa dicoba lewat kenaikan kapasitas dasar serta energi beli. Banyak aspek yang bisa mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia, satu diantaranya yaitu perkembangan ekonomi atau disingkat dengan PE (Rudolf, 2012).

Pembangunan manusia sering berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Tujuan utama pembangunan yaitu bergantung pada pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Bagi negara berkembang, menurut *United Nations Development Programme* (Ginting, 2008) jika jumlah barang dan produksi sosial meningkat maka akan terjadi peningkatan pula pada kualitas sumber daya manusia atau SDM, yang indikator pertumbuhannya bisa dilihat pada skala PBN atau Produk Domestik Bruto.

Agar pertumbuhan ekonomi bisa bertumbuh ada faktor pendukung yaitu dengan cara peningkatan investasi. Dengan meningkatkan investasi diharapkan bisa

meningkatkan pula pada ketersediaan infrastruktur yang memadai baik itu kuantitasnya ataupun kualitasnya, agar bisa menciptakan kepastiaan di hukum.

Pemerintah mempunyai sumber-sumber pendanaan untuk pelaksanaan pemerintah daerah didalam pelaksanaan otonomi daerah, diantaranya yaitu: (1) Dana Pertimbangan, (2) Pendapatan Asli Daerah, (3) Pinjaman dari daerah, dan (4) yaitu lain - lain penghasilan sah. Menurut UU No 33 Tahun 2004, memberitahukan bahwa "Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dihasilkan dari daerah dan dikumpulkan berlandaskan peraturan yang ada di daerah yang di sesuaikan bersama peraturan perundang-undangan. Peran pemerintahan daerah sangatlah penting didalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya dalam penggunaan pendapatan daerah yang untuk pembelanjaan daerah pada bagian yang bisa meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (semacam pendidikan, kesehatan, dan prasarana).

Pendapatan Asli Daerah berasal dari retribusi daerah, pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Dilihat dari hasil Pendapatan Asli Daerah di Jawa Timur di tahun 2009-2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harusnya sama dengan peningkatan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dana Penugasan Khusus (DAK) yaitu dana dari APBN yang dimana dana itu dialokasikan untuk daerah tertentu agar bisa membantu membiayai Acara Khusus yang dimana acara ini menjadi urusan daerah yang sejalan sama prioritas nasional. Untuk penggunaan Dana Alokasi Khusus adalah kewenangan pemerintahan daerah sebab Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari APBN. Supaya didalam penggunaan DAK pemerintah daerah bisa selaras dengan kepentingan Nasional, maka pemerintah pusat mengatur penggunaan Dana Penugasan Khusus dengan berbagai aturan yang ada. Dalam hubungan dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah DAK sebenarnya hanya sebagai perlengkapan atau penambahan jenis dana pengimbangan lainnya. DAK dalam penggunaan dan pemanfaatan menjadikan faktor penting dalam program untuk pembangunan daerah (Usman et al., 2008) dalam (Putra & Ulupui, 2015).

Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara menyebutkan bahwa "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu agenda keuangan dalam jangka tahunan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD". Tujuan serta fungsi APBD sama dengan APBN. APBD terdiri dari belanja daerah, pendapatan daerah, dan pembiayaan daerah. Belanja daerah biasanya diterapkan untuk, belanja barang dan jasa, belanja pegawai serta untuk belanja modal. Jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) jika semakin besar maka pendapatan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota juga akan semakin besar. Maka jika semakin besarnya pendapatan daerah maka semakin besar pula pengalokasian belanja pemerintah pusat yang dimana bisa meningkatkan berbagi potensi lokal pada daerah tersebut sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelayanan publik (Gorahe et al., 2014).

Jumlah penduduk disuatu daerah bisa digunakan untuk melihat pengeluaran belanja daerah, yaitu jika semakin meningkatnya perkembangan jumlah penduduk maka anggaran yang diperlukan juga semakin besar, sebab dengan meningkatkan jumlah penduduk maka akan memberikan dampak pada pengembangan media dan infrastruktur standar secara kapasitas dan karakter. Perkembangan penduduk yang semakin banyak membutuhkan jumlah yang lebih besar, agar kapasitas kemajuan ekonomi makin baik, dan saja diperlukan pengendalian pertumbuhan penduduk. Populasi juga menjadi bagian penting dalam peningkatan belanja daerah.

Beralaskan latar belakang tersebut, peneliti terikat untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur”.

Metode Penelitian

Penelitian ini memerlukan ancangan kuantitatif, sebab yang disajikan dalam penelitian ini berbentuk angka-angka. Hal seperti ini sama dengan pendapat (Arikunto, 2013) yang berpendapat bahwa penelitian kuantitatif membentuk pendekatan penelitian yang diwajibkan menggunakan angka, mulai dari, penafsiran terhadap data, pengumpulan data dan yang trakhir yaitu penampilan hasilnya.

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur, atas lembaga terkait yaitu Badan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur yang berada di Jl. Raya Kendangsari Industri No. 43-44 Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60292. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 - Januari 2021. Penelitian dilakukan dengan Uji regresi linier berganda. Tahun pengamatan dari tahun 2009-2019 untuk memperoleh data yang menunjukkan gambaran tentang Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Dana bagian spesial, Belanja Daerah dan Indeks Pengembangan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur.

Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah salah satunya indikator terjadinya pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur pada tahun 2009-2019 dapat disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1
Perkembangan Indeks Pembangunan
Manusia di Jawa Timur

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (%)	Perkembangan (%)
2009	71,60	-
2010	71,62	0,56
2011	72,18	0,56

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (%)	Perkembangan (%)
2012	72,83	0,65
2013	73,54	0,71
2014	68,14	-5,4
2015	68,95	0,81
2016	69,74	0,79
2017	70,27	0,53
2018	70,77	0,5
2019	71,5	0,73

Sumber : Badan Pusat Statistik 2009-2019 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur dari tahun 2009-2019 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2015 sebesar 68,95% mengalami perkembangan 0,81%. Dan perkembangan terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 68,14% dengan nilai perkembangan -5,4%.

2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam pelaksanaan pembangunan bisa tercapai dapat terlihat dari besaran output yang dihasilkan suatu daerah. Indikator terpenting dalam kegiatan ekonomi daerah salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun yang berdampak pada peningkatan pendapatan. PDRB merupakan indikator yang bisa digunakan sebagai ukuran dalam menilai suatu keberhasilan dari pembangunan daerah, bisa dikatakan bahwa pertumbuhan nilai PDRB suatu daerah ialah pertumbuhan ekonomi. Untuk melihat perkembangan ekonomi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Perkembangan (%)
2009	5,01	-
2010	6,68	1,67
2011	7,22	0,54
2012	7,27	0,05
2013	6,55	-0,72
2014	5,86	-0,69
2015	5,44	-0,42
2016	5,57	0,13
2017	5,46	-0,11
2018	5,50	0,04
2019	5,52	0,02

Sumber : Badan Pusat Statistik 2009-2019 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, perkembangan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur mengalami peningkatan yang cukup fluktuatif. Terdapat Pertumbuhan

ekonomi yang mengalami perkembangan tertinggi pada tahun 2009-2010, yang awalnya pada tahun 2009 sebesar 5,01% mengalami perkembangan sebesar 1,67% menjadi 6,68% pada tahun 2010. Dan perkembangan terendah pada tahun 2012-2013, yang awalnya Pertumbuhan Ekonomi sebesar 7,27% mengalami penurunan sebesar -0,72% menjadi 6,55%.

3. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Besar kecilnya nilai suatu PAD berasal dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dengan adanya PAD dapat membiayai program-program yang sudah direncanakan dan tertuang dalam RPJMD. Dibawah merupakan tabel perkembangan nilai PAD dari Provinsi Jawa Timur:

Tabel 3
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah
di Jawa Timur

Tahun	PAD (Miliar Rupiah)	Perkembangan (%)
2009	5.708.040.337.081,51	-
2010	7.154.985.156.500,43	0,25
2011	8.898.616.683.296,90	0,24
2012	9.725.627.568.500,81	0,09
2013	11.579.222.929.456,70	0,19
2014	14.442.516.534.958,90	0,24
2015	15.392.645.714.902,50	0,06
2016	15.900.699.087.340,20	0,03
2017	17.326.461.167.058,50	0,08
2018	8.499.535.556.408,82	-0,50
2019	19.327.125.485.405,90	1,27

Sumber : Badan Pusat Statistik 2009-2019 (diolah)

Dalam periode 2009-2019 nilai Pendapatan Asli Daerah di Jawa Timur memiliki rata-rata sebesar 12.177.770.565.537 ribu rupiah. Perkembangan nilai Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 sebesar 1,27% dengan nilai 19.327.125.485.405,90 ribu rupiah merupakan perkembangan tertinggi. Dan perkembangan terendah pada tahun 2018 sebesar -0,50% dengan nilai PAD sebesar 8.499.535.556.408,82 ribu rupiah.

4. Perkembangan Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK berasal dari APBD yang dialokasikan untuk daerah, DAK bertujuan guna mendanai kegiatan-kegiatan khusus pemerintah yang menjadi urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional. DAK lebih terfokus khususnya dalam membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat yang belum memenuhi standar yang ditentukan atau mendorong pembangunan daerah. Untuk melihat perkembangan nilai DAK dari Provinsi Jawa Timur dengan tabel dibawah ini :

Tabel 4
Perkembangan Dana Alokasi Khusus
Di Jawa Timur

Tahun	DAK (Miliar Rupiah)	Perkembangan (%)
2009	18.001.000.000,00	-
2010	56.982.200.000,00	0,68
2011	55.031.200.000,00	-0,03
2012	53.490.060.000,00	-0,02
2013	85.644.430.000,00	0,60
2014	101.875.970.000,00	0,18
2015	66.039.190.000,00	-0,35
2016	5.516.240.624.514,00	82,52
2017	7.056.095.687.317,00	0,27
2018	3.667.619.773.897,00	-0,48
2019	7.551.054.471.797,64	1,05

Sumber : Badan Pusat Statistik 2009-2019 (diolah)

Dari periode penerimaan Dana Alokasi Khusus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, yang dirata-ratakan sebesar 2.202.552.237.048 ribu rupiah. Perkembangan DAK tertinggi di Jawa Timur terdapat pada tahun 2016 sebesar 82,52% dengan nilai 5.516.240.624.514,00 ribu rupiah. Dan untuk perkembangan terendah DAK terjadi di tahun 2018 sebesar -0,48% dengan nilai 3.667.619.773.897,00 ribu rupiah.

5. Perkembangan Belanja Daerah

Belanja daerah yaitu bagian dari anggaran dari daerah yang dimana susunannya itu untuk satu periode, dalam satu periode itu menggambarkan strategi pemerintah didalam mengalokasikan sumber daya terbatas yang digunakan untuk pembangunan negara atau daerah, fungsinya untuk alat pengendalian serta instrumen politik. Dibawah ini merupakan tabel perkembangan Belanja Daerah di Jawa Timur:

Tabel 5
Perkembangan Belanja Daerah di Jawa Timur

Tahun	Belanja Daerah (Miliar Rupiah)	Perkembangan (%)
2009	7.602.038.807.526,87	-
2010	9.957.311.230.369,50	0,30
2011	11.857.906.468.828,20	0,19
2012	15.311.542.331.666,30	0,29
2013	16.711.548.513.611,50	0,09
2014	20.006.881.302.740,90	0,19
2015	22.936.300.360.145,70	0,14
2016	23.874.752.201.134,10	0,04
2017	28.893.245.170.348,30	0,21
2018	12.767.947.247.478,90	-0,55
2019	34.007.062.917.513,80	1,66

Sumber : Badan Pusat Statistik 2009-2019 (diolah)

Dari periode 2009-2019 nilai Belanja Daerah di Jawa Timur memiliki rata-rata sebesar 18.538.776.050.124 ribu rupiah. Perkembangan nilai Belanja Daerah tahun 2019 sebesar 1,66% dengan nilai 34.007.062.917.513,80 ribu rupiah merupakan perkembangan tertinggi. Dan perkembangan terendah pada tahun 2018 sebesar -0,55% dengan nilai Belanja Daerah 12.767.947.247.478,90 ribu rupiah.

6. Analisis dan Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis dipilih oleh peneliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. agar memudahkan analisis data peneliti memakai program IBM SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) for Windows versi 22.0.

Berdasarkan dari hasil analisis maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = -49,218 + 23,515X_1 + 2,489X_2 + 0,567X_3 + 2,919X_4$$

Berdasarkan persamaan diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

a. = Nilai konstanta : $Y = -49,218$

Menunjukkan bahwa apabila Pertumbuhan Ekonomi (X_1), Pendapatan Asli Daerah (X_2), Dana Alokasi Khusus (X_3) dan Belanja Daerah (X_4) dianggap konstan maka Indeks Pembangunan Manusia (Y) akan turun sebesar 49,218 persen.

$$\beta_1 = \text{Koefisien regresi } X_1 (\beta_1) : Y = 23,515$$

Positif itu dapat dipengaruhi oleh (X_1) Pertumbuhan Ekonomi yang artinya jika Pertumbuhan Ekonomi meningkat sebesar 1% maka Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur (Y) juga meningkat sebesar 23,515 persen. Yang bisa di asumsikan X_2 , X_3 dan X_4 konstan.

$$\beta_2 = \text{Koefisien regresi } X_2 (\beta_2) : Y = 2,489$$

Menunjukkan bahwa (X_2) itu Pendapatan Asli Daerah, yang berpengaruh positif, artinya jika Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 1 rupiah maka Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur (Y) juga meningkat sebesar 2,489 persen. Yang bisa diasumsikan X_1 , X_3 dan X_4 .

$$\beta_3 = \text{Koefisien regresi } X_3 (\beta_3) : Y = 0,567$$

Menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (X_3) berpengaruh positif, dapat diartikan apabila Dana Alokasi Khusus mengalami peningkatan sebesar 1 rupiah maka Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur (Y) meningkat sebesar 0,567 persen. Dengan asumsi X_1 , X_2 dan X_4 .

$$\beta_4 = \text{Koefisien regresi } X_4 (\beta_4) : Y = 2,919$$

Menunjukkan bahwa Belanja Daerah (X_4) berpengaruh positif, artinya jika Belanja Daerah mengalami peningkatan sejumlah 1 rupiah

maka Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur (Y) meningkat sebesar 2,919 persen. Yang diasumsikan X_1 , X_2 dan X_3 .

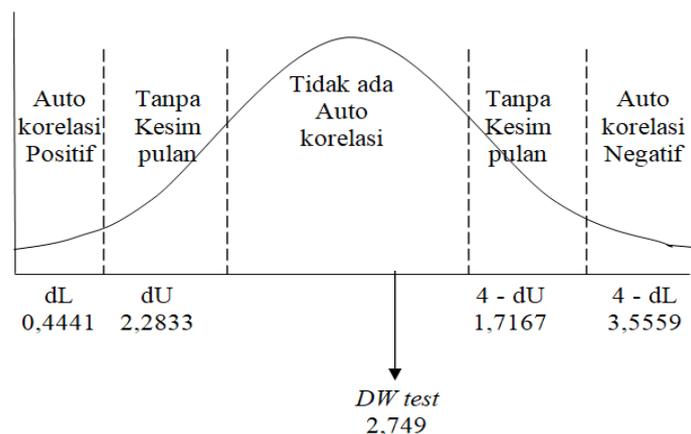
7. Pengujian Hipotesis

Pengujian ini dilakukan guna memperoleh hasil estimasi yang *BLUE* (*Best Linier Unbiased Estimator*) atau perkiraan linier tidak bias yang terbaik maka estimasi tersebut wajib memenuhi beberapa asumsi yang berkaitan. Jika salah satu asumsi tersebut dilanggar, maka persamaan regresi tidak lagi bersifat *BLUE*, sehingga pengambilan keputusan melalui Uji F dan Uji t menjadi bias.

a. Uji Autokorelasi

Dari hasil analisis kedua persamaan untuk uji autokorelasi pada penelitian diperoleh nilai DW test sebesar 2,749. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala autokorelasi dalam model penelitian maka dapat dibuktikan dengan kurva DW.

Dalam persamaan ini jumlah variabel bebas (k) adalah 4 dan banyaknya data (n) adalah 11 sehingga diperoleh nilai DW tabel adalah sebesar $dL = 0,4441$ dan $dU = 2,2833$. Dapat dilihat pada kurva dibawah ini :



Gambar 1
Kurva DW test

b. Uji Multikolinieritas

Untuk mengetahui apakah ada hubungan linier tertentu yang “sempurna” antara beberapa atau semua variabel bebas dalam model regresi, diperlukan uji langsung. statistik adaa atau tidaknya gejala multikolinier dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (*VIF*) dari hasil analisis regresi dengan ketentuan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Adapun hasil yang diperoleh setelah dilakukan pengujian analisis regresi linier berganda diketahui dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Nilai TOL dan VIF

Variabel	Tolerance	Ketentuan	VIF	Ketentuan	Keterangan
X ₁	0,693	≥ 0,10	1,444	≤10	TidakTerjadi Multikolinier
X ₂	0,461	≥ 0,10	2,168	≤10	Tidak Terjadi Multikolinier
X ₃	0,174	≥ 0,10	5,757	≤10	Tidak Terjadi Multikolinier
X ₄	0,231	≥ 0,10	4,322	≤10	Tidak Terjadi Multikolinier

Sumber : Lampiran 2 (Output SPSS)

Setelah dilakukan pengujian analisis regresi linier berganda mendapatkan hasil seperti pada tabel diatas, dapat diketahui dari ke-empat variable dalam pengujian Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur dengan nilai VIF lebih kecil dari 10 sehingga dalam model regresi tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan pengujian hipotesis ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat varians residual yang tidak sama antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi. Gunakan uji koefisien korelasi Rank Spearman untuk menguji heteroskedastisitas, yang mengkorelasikan *residual absolut* dari hasil regresi dengan semua variabel independen. Jika signifikansi hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%), persamaan regresi tersebut termasuk heteroskedastisitas, jika tidak berarti tidak terjadi heteroskedastisitas atau homoskedastisitas.

Heteroskedastisitas diuji menggunakan uji koefisien korelasi Rank Spearman, yang mengkorelasikan *residual absolut* hasil regresi dengan semua variabel independen. Hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 7
Korelasi Rank Spearman

Variabel (Y)	Sig 2-tailed (X ₁)	Sig 2-tailed (X ₂)	Sig 2-tailed (X ₃)	Sig 2-tailed (X ₄)	Ketentuan	keterangan
Indeks Pembangunan Manusia	0,873	0,979	0,689	0,537	≥ 0,05	Tidak terjadi heterokedastisitas

Sumber : Lampiran 2 (Output SPSS)

Sesuai dengan tabel 7, diperoleh dengan hasil tingkat signifikansi koefisien korelasi Rank Spearman untuk variabel terikat Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur, keseluruhan residualnya lebih besar dari 0,05 (tidak signifikan). Hal tersebut menunjukkan bahwa antara nilai residual dengan variabel yang menjelaskan tidak mempunyai korelasi yang berarti. Jadi, dapat disimpulkan bahwa persamaan tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil Uji Asumsi Klasik yang telah dilakukan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada model penelitian ini tidak terjadi pelanggaran asumsi klasik, maka dapat dilakukan analisis selanjutnya Gunakan metode yang disajikan dalam bab sebelumnya.

8. Uji F

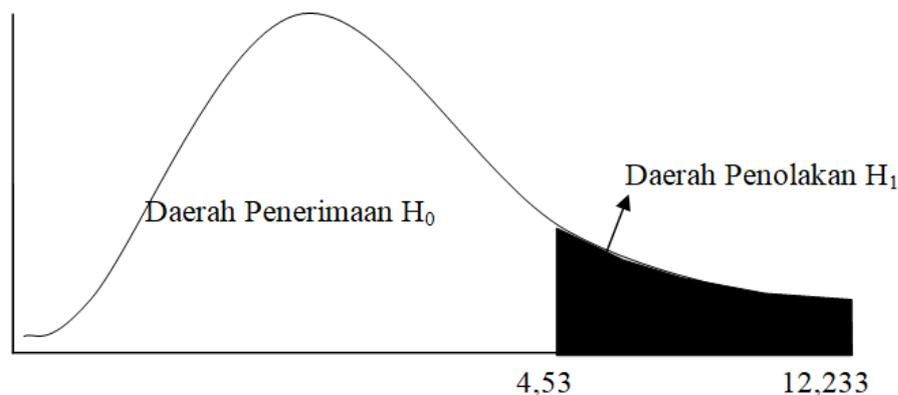
Untuk memahami pengaruh atau hubungan sekaligus (simultan), gunakan uji F untuk mendapatkan hasil perhitungan dari perhitungan menggunakan program SPSS ANOVA sebagai berikut :

Tabel 8
Anova

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Regression	3546,017	4	886,504	12,233	.005 ^a
Residual	434,826	6	0,390		
Total	3980,844	10			

Sumber : Lampiran 2 (*Output SPSS*)

Pada tabel ANOVA diperoleh nilai F hitung sebesar 12,233 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.005a. Sedangkan, nilai F tabel = ($\alpha = 0,05$) dengan dengan *degree of freedom (df1)* 4 (jumlah variabel bebas/k) dan *df2* 6 ($n-k-1$) diperoleh nilai F tabel sebesar 4,53. Dari hasil tersebut diketahui bahwa nilai F hitung $12,233 \geq F$ tabel 4,53 dengan dibuktikan pada kurva distribusi uji F dibawah ini :



Gambar 2
Kurva Distribusi Uji F

Maka dapat disimpulkan secara serempak Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah di Jawa Timur berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan pada bab sebelumnya.

9. Uji t

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh signifikan variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Hasil dari uji t dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 9
Hasil Analisis Uji t

Variabel	t Hitung	t Tabel
Pertumbuhan Ekonomi (X ₁)	5,695	2,447
Pendapatan Asli Daerah (X ₂)	1,453	2,447
Dana Alokasi Khusus (X ₃)	0,761	2,447
Belanja Daerah (X ₄)	2,682	2,447

Sumber : Lampiran 2 (*Output SPSS*)

B. Pembahasan

Dari hasil analisis penelitian diatas, dapat diambil kesimpulan secara keseluruhan diantaranya Pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, alokasi khusus & belanja daerah berpengaruh menurut signifikan dan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur. Adanya pengaruh dari ke-empat variabel bebas dapat memberikan kontribusi pada Indeks Pembangunan Manusia. Hal tersebut disebabkan karena ke-empat variabel bebas merupakan komponen penting dalam mengukur kualitas pembangunan manusia dalam kesejahteraan hidupnya, dapat membiayai pembangunan daerah, prasarana dan infrastruktur sehingga memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur. Alasan adanya pengaruh Pertumbuhan ekonomi, yaitu karena menunjukkan sejauh mana kegiatan ekonomi menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Jika balas jasa rill dalam penggunaan produksi didalam tahun tertentu jumlahnya lebih besar dari tahun sebelumnya maka ekonomi itu mengalami pertumbuhan. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat sehingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disuatu daerah meningkat. Dimana semakin tinggi pendapatan nasional atau daerah maka akan semakin besar juga harapan untuk pembukaan kapasitas produksi baru yang akan dapat menyerap tenaga kerja baru. Pendapatan yang tinggi tercermin dari tingginya pendapatan perkapita dan tumbuh secara positif dan berarti. Maka secara relatif semakin baik pertumbuhan ekonomi, maka akan semakin besar Saya harap saya tidak menganggur, mendorong pemerataan pendapatan per kapita dan mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia (Putong, 2009).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berdampak parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur. Tidak adanya pengaruh PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur dikarenakan semakin tinggi PAD pada suatu

daerah maka dapat menurunkan Indeks Pembangunan Manusia. Karena PAD lebih banyak digunakan untuk kegiatan belanja pegawai atau belanja langsung dari pada membiayai belanja modal yang memiliki pengaruh terhadap pembangunan manusia. PAD tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat kemungkinan disebabkan PAD Jawa Timur relatif kecil dibanding non PAD. Sehingga, kontribusinya terhadap pembangunan juga sangat kecil. Penggunaan PAD oleh pemerintah seharusnya membuat kemampuan daerah dalam membiayai daerahnya sendiri agar dapat menunjang sarana dan prasarana publik seperti sarana pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan penelitian (Badrudin & Khasanah, 2011) menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap IPM.

Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial Tidak mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur. Tidak adanya pengaruh DAK terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur disebabkan karena pembangunan manusia tidak hanya dapat dijelaskan dari segi kuantitas (fisik, bangunan) melainkan juga dari segi kualitas (hidup, manusia). Dan sementara DAK lebih dipergunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana (fisik) dan jumlah DAK jauh lebih kecil jika dibandingkan dana lainnya, seperti PAD dan DAU. Pemberian DAK tiap daerah juga berbeda-beda dan tidak semua daerah mendapatkan DAK. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian (Adiputra, 2015). Namun, penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian (Setyowati & Suparwati, 2012).

Belanja Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur. Adanya pengaruh Belanja Daerah yaitu memiliki dan ini juga merupakan peran nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan jika dilakukan dengan benar akan meningkatkan perekonomian daerah. Oleh karena itu, idealnya belanja masyarakat dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Peran belanja masyarakat adalah untuk mengembangkan infrastruktur/infrastruktur (misalnya pembangunan jalan, bendungan, dll), penyediaan layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, hibah dan dukungan sosial kepada berbagai pihak pemangku kepentingan. Pembangunan infrastruktur akan memperkerjakan banyak tenaga kerja, yang diberikan pendapatan sebagian dari padanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang selanjutnya Hal ini diikuti oleh peningkatan tingkat konsumsi. Peningkatan konsumsi masyarakat akan mendorong produksi, dan dampak dari *multiple effect* ini akan meningkat dan berkelanjutan, sehingga dapat terlihat hasilnya. bahwa Dapat mengatasi pengangguran, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian (Pratowo, 2012) dan (Priambodo, 2015). Namun tidak konsisten dengan penelitian (Badrudin & Khasanah, 2011).

Kesimpulan

Dari hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. simultan dan parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara simultan dan tidak berpengaruh secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur, Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara simultan dan tidak berpengaruh secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur dan Belanja Daerah berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur.

BIBLIOGRAFI

- Adiputra, I. (2015). Made Pradana, Ni Kadek Desi Dwi Yantari, Dewa Kadek Darmada. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan SILPA Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. [Google Scholar](#)
- Arikunto, S. (2013). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. [Google Scholar](#)
- Badrudin, R., & Khasanah, M. (2011). Pengaruh pendapatan dan belanja daerah terhadap pembangunan manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Buletin Ekonomi*, 9 (1). [Google Scholar](#)
- Ginting, C. K. (2008). Analisis Pembangunan Manusia di Indonesia. [Google Scholar](#)
- Gorahe, I., Masinambow, V., & Engka, D. (2014). Analisis belanja daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14 (3). [Google Scholar](#)
- Ogestiawan, I. (2012). Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal Dengan Kualitas Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah). Universitas Muhammadiyah Surakarta. [Google Scholar](#)
- Prasetyo, P. E. (2008). Peran usaha mikro kecil dan menengah (umkm) dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. *Akmenika Upy*, 2 (1), p1-13. [Google Scholar](#)
- Pratowo, N. I. (2012). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Studi Ekonomi Indonesia*, 1(1), 15–31. [Google Scholar](#)
- Priambodo, A. (2015). Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2007-2013). Universitas Brawijaya. [Google Scholar](#)
- Putong, I. (2009). Pengantar Mikro dan Makro Edisi 4. Mitra Wacana M. Jakarta. [Google Scholar](#)
- Putra, P. G. M., & Ulupui, I. (2015). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 11 (2015), 863–877. [Google Scholar](#)
- Rudolf, I. P. (2012). Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal Dan Kualitas Pembangunan Manusia Di Sumatera Barat. Universitas Andalas. [Google Scholar](#)
- Setyowati, L., & Suparwati, Y. K. (2012). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, dau, dak, pad terhadap indeks pembangunan manusia dengan pengalokasian anggaran

belanja modal sebagai variabel intervening. *Jurnal Prestasi*, 9 (1), 113–133. [Google Scholar](#)

Usman, S., Mawardi, M. S., Poesoro, A., Suryahadi, A., & Sampford, C. (2008). Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Lembaga penelitian Smeru. [Google Scholar](#)

Widodo, P. (2011). P, Dkk. Pemodelan Sistem Berorientasi Objek Dengan UML. [Google Scholar](#)

Copyright holder:

Devita Rosmadayanti, Niniek Imaningsih, Riko Setya Wijaya (2021)

First publication right:

Jurnal Syntax Admiration

This article is licensed under:

